

**PENGARUH PERTUMBUHAN UMKM, INDEKS KETERBUKAAN
PERDAGANGAN, PERTUMBUHAN PENDAPATAN PER KAPITA, DAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PENGENTASAN
KEMISKINAN DI 5 NEGARA ASEAN**

Ernestus Florian Lamaile¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya

¹ernetus.florian@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of MSME Growth, Trade Openness Index, Per Capita Income Growth, dan Human Development Index on Poverty Alleviation in 5 ASEAN Countries with the research period 2014-2019. The population of this study is poverty as measured in the proportion of the population below the poverty line. This study uses the Panel Data method, and the results show that there is no significant relationship between MSME Growth and Poverty Alleviation. Meanwhile, there is a significant relationship between the Trade Openness Index, Per Capita Income Growth, and the Human Development Index on Poverty Alleviation in 5 ASEAN Countries.

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang mendasar dalam pembangunan ekonomi, khususnya pada negara – negara berkembang di wilayah ASEAN adalah kemiskinan. Hingga saat ini, kemiskinan masih menjadi pembahasan yang sangat relevan di berbagai negara berkembang. Kemiskinan menjadi faktor utama dan mendasar dari permasalahan sosial lainnya. Menurut *World Bank*, kemiskinan didefinisikan sebagai kurangnya kesejahteraan. Rendahnya tingkat Pendidikan dan Kesehatan, sulitnya mendapatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi, menjadi bagian dari banyaknya dimensi kesejahteraan. Konsep serta definisi kemiskinan kerap kali menjadi pro dan kontra karena perspektif yang digunakan beragam, mulai dari perspektif ekonomi, perspektif sosiologi, hingga perspektif moralitas.

Terlepas dari konsepnya yang bersifat multidimensi, isu kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang rumit dan harus ditangani oleh negara secara serius. Angka kemiskinan yang tinggi menjadi tanda bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah begitu besar dalam mengentaskannya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* memasukkan masalah sosial kemiskinan menjadi poin nomor satu diantara permasalahan sosial lainnya. Bunyi dari Tujuan 1 dalam SDGs yaitu Tanpa Kemiskinan atau *No Poverty*. Ini artinya, kemiskinan menjadi tujuan utama yang diprioritaskan dan harus segera diselesaikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa dalam mengukur kemiskinan di Indonesia, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan sendiri merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minuman makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Sementara itu Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan membantu penduduk miskin keluar ke atas Garis Kemiskinan, pemerintah dari masing-masing negara ASEAN membuat berbagai program dan kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat kecil dan berdampak pada akar permasalahan. Salah satu fokus pemerintah yaitu mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kehidupan dan keseharian masyarakat tidak pernah terlepas dari UMKM. Mulai dari keluar rumah membeli makanan di warung, membeli baju di sebuah toko baju, memenuhi hobi atau keinginan dengan bermain bersama teman di cafe, dan masih banyak kegiatan lain yang tentu berhubungan dengan UMKM. Di Indonesia, pertumbuhan UMKM mengalami kenaikan yang cukup pesat di setiap tahunnya. Di tahun 2010-2015, pertumbuhan UMKM mencapai 12,32% atau sebanyak 6.498.022. Jumlah tenaga kerja pada sektor UMKM pun ikut bertumbuh hingga 28,11 % atau sebanyak 27.035.763.

Dalam UU No 20 tahun 2008, UMKM dijelaskan sebagai perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Meskipun kecil, UMKM memiliki kontribusi yang besar dan sangat krusial bagi perekonomian secara makro. Jika digabungkan, skala kegiatan ekonomi UMKM memberi kontribusi sekitar 60% terhadap total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menurut Tambunan (2009:51, diacu dalam Ariwibowo 2013) sektor UMKM meliputi berbagai sektor bisnis seperti (a) Pertanian, (b) Pertambangan dan penggalian, (c) Industri Manufaktur, (d) Listrik, gas, dan air bersih, (e) Bangunan, (f) Perdagangan, hotel dan restoran, (g) Transportasi dan Telekomunikasi, (h) Keuangan, penyewaan dan jasa, (i) serta jasa-jasa lainnya.

Pada masa krisis moneter di tahun 1998, UMKM mampu menjadi penopang sekaligus penyelamat ekonomi di Indonesia. Pengalaman ini membuat berbagai pihak menyadari bahwa UMKM perlu diberi porsi lebih besar. Hal ini tentu menjelaskan bahwa UMKM sebagai sumber daya produktif harus terus diberi dukungan nyata untuk dapat mengembangkan potensi dan memberi pengaruh yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai apabila pemanfaatan sumber daya produktif dapat dioptimalkan dan dialokasikan secara merata.

Saat ini UMKM berjalan bukan tanpa kendala yang berarti. Berbagai permasalahan UMKM yang masih perlu dibantu adalah ketersediaan modal, pengembangan diri dan peningkatan kemampuan melalui pelatihan kewirausahaan, serta akses menuju pasar terutama pasar ekspor. Ketersediaan modal seringkali menjadi permasalahan mendasar bagi setiap orang dalam memulai suatu usaha. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melalui berbagai program pinjaman modal. Namun ternyata, modal dalam artian uang saja tidak menjamin keberlangsungan suatu usaha. Permasalahan selanjutnya yaitu kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola usahanya. Sebagian pelaku UMKM khususnya dalam skala mikro tidak memiliki kemampuan atau *softskill* tertentu ketika menjalankan usahanya, sehingga banyak yang tidak bertahan lama setelah mendapat bantuan modal. Oleh karena itu sangatlah penting untuk memberikan berbagai pelatihan seperti manajemen keuangan, pengelolaan bahan baku, promosi usaha, ataupun *creative thinking*.

Setelah menyelesaikan dua kendala utama, permasalahan yang lebih kompleks lagi muncul yaitu bagaimana agar produk UMKM dapat tembus hingga ke pasar ekspor

atau bagaimana agar usaha UMKM di wilayah ASEAN bisa menjadi target investasi untuk kemudian dikembangkan menjadi produk-produk yang lebih berstandar internasional. Indeks Keterbukaan Perdagangan dapat menjadi cerminan bagaimana keberhasilan suatu negara dalam mendorong ekspor dan juga investasi. Ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama bagi seluruh pihak yang secara langsung terlibat dalam proses pengembangan UMKM di wilayah ASEAN.

Berdasarkan uraian diatas, maka melalui penelitian ini, peneliti mencoba untuk menganalisis bagaimana Pengaruh Pertumbuhan UMKM terhadap Pengentasan Kemiskinan di 5 Negara ASEAN dengan menggunakan indikator pertumbuhan UMKM, Indeks Keterbukaan Perdagangan, Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia serta variabel kemiskinan itu sendiri. Peneliti menggunakan 5 negara ASEAN diantaranya Indonesia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

TINJAUAN TEORITIS DAN LITERATUR

Dalam proses menganalisis pengaruh pertumbuhan jumlah UMKM, serta beberapa indikator lain seperti indeks keterbukaan perdagangan, pertumbuhan pendapatan per kapita, dan indeks pembangunan manusia terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia, diperlukan berbagai teori yang mendasari penelitian. Landasan teoritis ini berisi teori yang relevan dengan objek yang diteliti.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Setiap negara di wilayah ASEAN memiliki definisi masing-masing mengenai UMKM. Mengambil contoh dari Indonesia, BPS memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang mempunyai jumlah tenaga kerja 5-19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang mempunyai tenaga kerja 20-99 orang.

Bank Dunia membagi UMKM menjadi 3 jenis dengan pendekatan berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan, dan aset yang dimilikinya. Usaha Mikro (*micro enterprise*) memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang, pendapatan setahun tidak melebihi US \$100.000, dan jumlah aset tidak melebihi US \$100.000. Usaha kecil (*small enterprise*) memiliki jumlah karyawan kurang dari 30 orang, pendapatan dalam setahun kurang dari US \$3.000.000, dan kepemilikan aset kurang dari US \$3.000.000. Usaha menengah (*medium enterprise*) memiliki jumlah karyawan maksimal 300 orang,

pendapatan setahun sebesar US \$15.000.000, dan kepemilikan aset mencapai US \$15.000.000.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Mikro, yaitu:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Kecil, yaitu:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Menengah, yaitu:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.

Nilai nominal pada kriteria diatas dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Dalam Undang-Undang diatas dijelaskan juga mengenai Asas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu Kekeluargaan, Demokrasi Ekonomi, Kebersamaan, Efisiensi Berkeadilan, Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, Kemandirian, Keseimbangan, Kemajuan, dan Kesatuan Ekonomi Nasional. UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Selain tujuan secara umum dan luas, UMKM memiliki Tujuan Pemberdayaan, diantaranya:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang Tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dalam Buku Profil Bisnis UMKM yang ditulis oleh LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) tahun 2015, UMKM memiliki karakteristik yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Dalam laman infoukm.wordpress.com, UMKM dibagi dalam 4 klasifikasi berdasarkan perspektif perkembangannya, yaitu:

1. *Livelihood Activities* atau yang lebih dikenal sebagai sektor informal merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Contohnya seperti pedagang kaki lima.
2. UMKM Mikro atau *Micro Enterprise* adalah UMKM yang memiliki sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
3. Usaha Kecil Dinamis atau *Small Dynamic Enterprise* adalah kelompok UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Karakteristik UMKM adalah sebuah kondisi faktual yang berkaitan dengan aktivitas usaha, sifat atau perilaku pengusaha dalam menjalankan usahanya. Berikut ini merupakan Karakteristik UMKM berdasarkan ukuran usaha, mulai dari Usaha Mikro hingga menengah.

Karakteristik Usaha Mikro diantaranya:

1. Jenis barang tidak selalu tetap, dapat berganti sewaktu-waktu.
2. Tempat usahanya tidak selalu tetap, dapat berpindah sewaktu-waktu.
3. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki karakter seorang wirausaha yang memadai.
4. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun.
5. Umumnya belum memiliki akses memadai ke perbankan, namun Sebagian sudah akses melalui Lembaga keuangan non-bank.
6. Tidak memisahkan keuangan usaha dengan keuangan keluarga.
7. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
8. Contohnya seperti Pedagang Kaki Lima atau pedagang-pedagang di pasar.

Karakteristik Usaha Kecil, diantaranya:

1. Jenis barang yang diusahakan umumnya sudah tetap dan tidak mudah berubah.
2. Lokasi usaha umumnya sudah menetap atau tidak berpindah-pindah.
3. Sumber daya manusia (pengusaha) sudah memiliki pengalaman sebagai seorang wirausaha yang memadai.
4. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana.
5. Sebagian sudah akses ke perbankan untuk keperluan modal.
6. Keuangan usaha sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga.
7. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
8. Sudah membuat neraca usaha.
9. Sebagian besar belum bisa membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.
10. Contohnya seperti Pedagang di pasar grosir (agen) atau pedagang-pedagang pengumpul lainnya.

Karakteristik Usaha Menengah, diantaranya:

1. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih.
2. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.
3. Sudah memiliki akses ke sumber pendanaan perbankan.
4. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian.
5. Telah melakukan aturan atau pengelolaan untuk organisasi perburuhan.

Selain karakteristik secara umum, berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM juga memiliki karakteristiknya sendiri, diantaranya:

1. Kualitasnya belum memenuhi standar karena sebagian besar UMKM belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan biasanya dalam bentuk *handmade*.
2. Desain produk menjadi terbatas karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai produk.
3. Jenis produk terbatas. Apabila ada permintaan konsumen untuk model baru, UMKM cenderung sulit untuk memenuhinya. Seandainya permintaan tersebut diterima, maka membutuhkan waktu yang lama.
4. Kapasitas dan daftar harga produk terbatas sehingga seringkali konsumen kesulitan.
5. Bahan baku kurang terstandar karena diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.
6. Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna karena produksi belum teratur sehingga produk yang dihasilkan sering apa adanya.

UMKM di Indonesia kerap dikaitkan dengan masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya angka kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara kota dan desa, serta masalah urbanisasi. Bagi perekonomian nasional, UMKM memiliki peranan yang sangat penting karena efektif membantu permasalahan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah kebawah.

Pada masa Krisis Moneter 1998 dan Krisis Ekonomi 2008, 96% UMKM tetap bertahan dari goncangan krisis karena tidak menggantungkan diri pada mata uang asing dan utang luar negeri. UMKM berkontribusi sebagai pemain utama dalam kegiatan

ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja terbesar, penyeimbang neraca pembayaran melalui ekspor, pencipta pasar baru dan sumber inovasi serta investasi bagi negara.

UMKM juga meningkatkan perekonomian daerah melalui pembukaan lapangan pekerjaan sehingga menurunkan angka pengangguran dan membantu memberdayakan masyarakat. UMKM berhasil menjangkau daerah-daerah pelosok sambil memperkenalkan budaya setempat yang membuat masyarakat tidak perlu ke kota untuk mendapat penghidupan yang layak sehingga terjadi pemerataan ekonomi bagi rakyat kecil. Keberadaan UMKM dalam struktur perekonomian Indonesia telah mendominasi lebih dari 99% dan merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang bersifat produktif. UMKM mampu menghemat devisa karena tidak bergantung pada komponen impor, melainkan memaksimalkan bahan baku dan sumber daya lokal yang mudah ditemukan. Secara geografis, UMKM tersebar hampir di seluruh tanah air dan di semua sektor sehingga memiliki *multiplier effect* yang tinggi.

Akan tetapi, dibalik perannya yang sangat krusial bagi perekonomian nasional, UMKM masih memiliki keterbatasan dan juga kendala baik secara internal maupun eksternal. Berikut ini merupakan kendala yang dihadapi para pelaku UMKM:

A. Sisi Internal

1. Modal

- a. Sekitar 60-70% UMKM belum mendapatkan akses atau pembiayaan melalui perbankan.
- b. Kondisi geografis membuat belum banyak perbankan yang mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil.
- c. Manajemen bisnis dan keuangan pada umumnya masih dikelola secara manual dan tradisional. Seringkali pengelola belum dapat memisahkan

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Kurangnya wawasan dan pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru serta cara menerapkan *quality control* terhadap suatu produk.
- b. Kemampuan membaca arah dan kondisi pasar masih belum tajam sehingga kebutuhan yang diinginkan pasar belum dapat ditangkap secara cermat.
- c. Dari sisi kuantitas, adanya keterbatasan dalam kemampuan menggaji sehingga belum dapat melibatkan tenaga kerja yang lebih banyak.

3. Hukum

UMKM umumnya masih berbadan hukum perorangan.

4. Akuntabilitas

Secara umum pelaku UMKM belum mempunyai sistem administrasi manajemen dan keuangan yang terstandarisasi.

B. Sisi Eksternal:

1. Iklim Usaha

- a. Koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan masih belum padu dan membuat situasi belum sepenuhnya kondusif. Lembaga pemerintah, institusi pendidikan, lembaga keuangan, dan asosiasi usaha sering berjalan masing-masing.
- b. Aspek legalitas badan usaha, kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi dan distribusi, serta kebijakan dalam unsur pendanaan untuk UMKM belum sepenuhnya tuntas dilakukan.

2. Akses dan Infrastruktur

- a. Sulit dan terbatasnya akses serta infrastruktur terhadap bahan baku seringkali membuat UMKM mendapat bahan baku berkualitas rendah.
- b. Akses terhadap teknologi sulit, apalagi jika pasar dikuasai oleh grup bisnis tertentu. Sarana dan prasarana terhadap teknologi menjadi terbatas. Oleh karena itu, kebanyakan UMKM masih menggunakan teknologi yang sederhana.
- c. UMKM belum mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat berubah, terutama bagi yang sudah menembus pasar ekspor. Hal ini membuat UMKM sering tersingkirkan oleh perusahaan yang memiliki modal lebih besar.

2.1.1 Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS memakai konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) sehingga dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk yang

memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai Penduduk Miskin. Garis kemiskinan adalah penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan seterusnya. Sementara itu, Garis Kemiskinan Non Makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Berdasarkan konteks strategi penanggulangan kemiskinan oleh Bappenas (2004), kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Pemahaman akan kemiskinan tidak lagi hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, melainkan juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi setiap orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang dimaksud disini adalah hak-hak yang dipahami penduduk miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang lebih layak dan hak yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum yaitu seperti terpenuhinya kebutuhan pangan, Kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Bappenas (2004) mengungkapkan bahwa dengan diakuinya konsep kemiskinan berbasis hak, maka kemiskinan dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan atau pelanggaran hak dan tidak terpenuhinya hak. Di sisi lain, kemiskinan juga dipandang sebagai perampasan atas daya penduduk miskin. Konsep ini memberikan pengakuan bahwa orang miskin terpaksa menjalani kemiskinan dan seringkali mengalami pelanggaran hak yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia. Konsep ini sekaligus memberikan penegasan terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar penduduk miskin.

Di Indonesia, upaya pengentasan kemiskinan masih menjadi prioritas nasional di setiap rencana kerja pemerintah. Bahkan kemiskinan tidak hanya menjadi prioritas nasional saja, melainkan secara global dan tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Bappenas (2018) menyampaikan penurunan kemiskinan menjadi isu yang mendapatkan perhatian serius karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan penghidupan manusia, baik aspek ekonomi, politik, sosial budaya, psikologi, teknologi, dan lainnya yang saling terkait. Karena hal tersebut, upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan waktu, strategi, dan sumber daya yang perlu disinergikan untuk menyelesaikannya. Peran dan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus saling mendukung serta berjalan dengan kompak agar permasalahan kemiskinan bisa teratasi.

Secara Umum, konsep kemiskinan dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Bappenas, 2018). Kemiskinan absolut merupakan kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti sandang, pangan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum ini diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan pokok minimum inilah yang dikenal sebagai garis kemiskinan. Sementara itu, kemiskinan relatif adalah kondisi yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan seseorang lebih miskin dibandingkan dengan lainnya. Ukuran kemiskinan relatif sangat bergantung pada kondisi distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk. Kondisi inilah yang akhirnya memunculkan fenomena ketimpangan pendapatan.

Robert Chambers (1984, diacu dalam Bappenas, 2018) menjelaskan pandangannya tentang kemiskinan khususnya di wilayah pedesaan. Menurutnya, kemiskinan merupakan klaster atau pusat pertemuan dari berbagai kondisi kurang menguntungkan yang terkait satu sama lain, sehingga menyebabkan seseorang terperangkap serta sulit keluar dari kondisi kemiskinan. Kondisi kurang menguntungkan tersebut diantaranya meliputi kelemahan fisik, kerentanan terhadap guncangan, keterisolasian, ketidakberdayaan, dan kemiskinan itu sendiri.

Saat ini, kemiskinan tidak lagi terbatas pada aspek ekonomi saja, melainkan jauh lebih luas lagi atau dikenal sebagai kemiskinan pendapatan. Selama ini, kemiskinan

sering dianggap sebagai ketidakcukupan pendapatan dan aset untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar dalam konteks ekonomi seperti sandang, pangan, dan papan. Padahal sebenarnya pengertian kemiskinan jauh lebih luas dari sekedar menurunnya pendapatan atau aset sebagaimana yang didefinisikan oleh Bank Dunia yaitu kemiskinan berkaitan dengan ketiadaan tempat tinggal, rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, ketiadaan lapangan pekerjaan, kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh ketiadaan akses terhadap air bersih, ketidakberdayaan, kurangnya keterwakilan atau representasi dan kebebasan.

Selain pengukuran kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya, kemiskinan juga dapat dibedakan berdasarkan faktor penyebabnya yaitu:

1. Kemiskinan Alamiah: Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alam yang tidak mendukung, misalnya karena kondisi alam yang gersang (kering dan tidak teratur), sumber daya alam terbatas, dan wilayah yang terisolir.
2. Kemiskinan Struktural: Kemiskinan yang terjadi akibat kesalahan dalam kebijakan pemerintah, misalnya korupsi dana bantuan, dan sebagainya.
3. Kemiskinan Kultural: Kemiskinan yang terjadi akibat faktor sosial kultural di suatu masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan manusia, saat ini kemiskinan tidak hanya dilihat dari rendahnya pendapatan saja, tetapi juga dari keahlian lain seperti bersosialisasi dan berpolitik. Pada pembangunan tahap awal, negara akan lebih fokus untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang terkait dengan ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar, namun seiring dengan meningkatnya pendapatan rata-rata per kapita, negara akan mulai memperhatikan masalah yang jauh lebih kompleks. Oleh karena itu, pengukuran kemiskinan sangat dibutuhkan sebagai suatu instrument bagi para pengambil kebijakan untuk mengevaluasi keberhasilan program-program pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan (Bappenas, 2018).

Dalam skala nasional melalui BPS, Indonesia telah melakukan pengukuran kemiskinan sejak tahun 1984 menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau yang dikenal dengan Susenas. BPS mulai rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin per tahun sejak tahun 2003 dan mulai melaporkan tingkat kemiskinan dua kali dalam setahun (Maret dan September) sejak tahun 2011. Dalam skala global, United Nations Development Programme (UNDP) secara rutin mengeluarkan laporan

tahunan mengenai pembangunan manusia di berbagai negara atau *Human Development Report* sejak tahun 1990. Indeks Kemiskinan Manusia atau *Human Poverty Index* (HPI) menjadi salah satu indeks yang diperkenalkan oleh UNDP. HPI mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup. Akan tetapi, HPI tidak dapat mengidentifikasi individu ataupun rumah tangga miskin sehingga untuk menyempurnakan hal tersebut, dikembangkanlah pendekatan kemiskinan multidimensi atau *Multidimensional Poverty Index* (MPI) yang menganalisa kemiskinan pada level rumah tangga maupun individu melalui tiga dimensi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

Selain HPI dan MPI, Bank Dunia (2007) menjelaskan satuan ukuran lainnya yang digunakan untuk mengukur kemiskinan diantaranya:

1. Indeks Angka Kemiskinan (*Poverty Headcount Index*), merupakan angka jumlah penduduk yang memiliki tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan.
2. Indeks Kesenjangan Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) menghitung penurunan rata-rata konsumsi agregat terhadap garis kemiskinan untuk seluruh penduduk, dengan nilai nol (0) diberikan kepada mereka yang berada di atas garis kemiskinan. Kesenjangan kemiskinan dapat memberikan indikasi tentang berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk menanggulangi kemiskinan melalui bantuan tunai yang ditujukan secara tepat kepada penduduk miskin. Indeks ini dapat menggambarkan tingkat kedalaman kemiskinan dengan lebih baik, namun tidak menunjukkan tingkat keparahan kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*), memberi bobot yang lebih besar bagi penduduk yang sangat miskin dengan mengkuadratkan jarak garis kemiskinan. Indeks ini dihitung dengan mengkuadratkan penurunan relatif konsumsi per kapita terhadap garis kemiskinan, dan kemudian nilai tersebut dirata-ratakan dengan seluruh penduduk, sambil memberikan nilai nol bagi penduduk yang berada di atas garis kemiskinan.
4. Kemampuan Daya Beli (*Purchasing Power Parity*), merupakan suatu ukuran untuk membandingkan kemiskinan antarnegara. Bank Dunia menggunakan perkiraan konsumsi yang dikonversikan ke dollar Amerika dengan menggunakan paritas (kesetaraan) daya beli. Purchasing Power Parity menunjukkan jumlah satuan mata uang suatu negara yang dibutuhkan untuk membeli barang dan jasa

dalam jumlah yang sama di negara itu, yang nilainya sama dengan nilai 1 dollar AS yang dibelanjakan di Amerika Serikat.

Pada umumnya, kemiskinan memiliki karakteristik spesifik berbeda di setiap negara. Menurut Quiribia (1998, diacu dalam Bappenas, 2018), penduduk miskin memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. Kondisi Geografis

Umumnya penduduk dengan tingkat kemiskinan tinggi berada di wilayah pedesaan. Penduduk miskin di daerah pedesaan cenderung berpendapatan dan berdaya konsumsi rendah. Selain itu, ada pula faktor kekurangan gizi, buta huruf, tingginya angka kematian bayi, dan standar perumahan yang rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh kurangnya fasilitas umum seperti infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, dan layanan keuangan yang sulit menjangkau wilayah pedesaan.

2. Kondisi Demografis

Keluarga miskin cenderung memiliki ukuran keluarga yang besar dengan jumlah anak yang lebih banyak. Karena pendapatan anggota keluarga terbatas, sementara jumlah biaya semakin tinggi, akhirnya mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi seluruh anggota keluarga secara merata. Selain itu, rumah tangga atau keluarga dengan kepala keluarga perempuan memiliki kecenderungan untuk berada pada kondisi kemiskinan yang lebih besar apabila dibandingkan dengan rumah tangga pada umumnya (Killick, 1981, diacu dalam Bappenas, 2018).

3. Aset

Dalam perekonomian dengan mayoritas penduduk yang berkerja di sektor pertanian, lahan merupakan salah satu aset penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi. Namun, penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki lahan dan tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola lahan tersebut (Adelman, 1986 diacu dalam Bappenas, 2018).

Berdasarkan analisis, Bappenas (2018) mencatat beberapa pandangan penyebab kemiskinan diantaranya:

1. Kelompok pandangan ekonomi politik.

Kelompok ini menyatakan bahwa munculnya kemiskinan khususnya di daerah pedesaan merupakan hasil dari proses pengkonsentrasian kekayaan dan kekuasaan. Proses tersebut terjadi melalui tiga tingkatan yaitu:

a. Tingkat Global

Munculnya kemiskinan diakibatkan oleh pertukaran yang eksploitatif dan tidak seimbang antara negara kaya dan negara miskin, sehingga negara miskin akan tetap menjadi miskin meskipun telah memperoleh manfaat dari investasi.

b. Tingkat Nasional

Kemiskinan di pedesaan muncul sebagai akibat dari ulah beberapa kelompok kepentingan terutama kelompok kepentingan perkotaan, seperti kelompok berpendapatan menengah di perkotaan yang berusaha memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan penduduk di desa.

c. Tingkat Lokal

Kemiskinan di pedesaan muncul sebagai akibat dari ulah para elit lokal seperti tuan tanah, pedagang, preman, dan birokrat yang terus mengkonsolidasikan kekuasaan dan kekayaan mereka.

2. Kelompok pandangan ekologi.

Kelompok ini melihat kemiskinan di pedesaan sebagai akibat dari tekanan penduduk yang tidak terkendali atas sumber daya dan lingkungan. Tekanan penduduk ini membuat usaha pertanian menjadi semakin sempit. Akibatnya upah riil turun dan jumlah pengangguran meningkat.

Berdasarkan pendapat para ahli, berbagai faktor penyebab kemiskinan dapat digolongkan ke beberapa faktor (Bappenas, 2018) yaitu:

1. Faktor kondisi alam dan lingkungan seperti adanya perubahan iklim yang ekstrem, kerusakan lingkungan, distribusi sumber daya yang tidak merata, dan sering terjadi bencana alam.
2. Faktor penduduk seperti tingginya pertumbuhan penduduk sehingga menekan sumber daya alam dan adanya migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan.

3. Faktor Eksploitasi yang terjadi antarkelas, antarkelompok, antarwilayah, dan antarnegara, termasuk adanya hubungan ekonomi internasional yang tidak seimbang antara negara maju dan berkembang.
4. Faktor kelembagaan dan struktural seperti adanya kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran dan cenderung mengabaikan daerah pedesaan.
5. Faktor teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong dan meningkatkan produktivitas usaha tani yang juga merupakan mata pencaharian utama dari mayoritas penduduk pedesaan.

Ada berbagai kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan yang telah terbukti mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di berbagai negara, terutama negara berkembang. Irma Adelman (1986, diacu dalam Bappenas, 2018) berpendapat dalam tulisannya yang berjudul “Poverty-Focused Approaches to Development Policy”, bahwa ada empat pendekatan yang dapat digunakan sebagai strategi dalam upaya penurunan kemiskinan, diantaranya:

1. Pendekatan yang berorientasi kepada aset untuk meningkatkan kuantitas aset kelompok miskin melalui reformasi agraria atau dengan menciptakan institusi yang memungkinkan kelompok miskin memiliki akses dalam melakukan akumulasi aset. Misalnya melalui pemberian kredit yang disubsidi atau memperluas akses pendidikan dasar terhadap kelompok miskin.
2. Penciptaan permintaan untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja kelompok miskin yang umumnya terdiri atas tenaga kerja tidak terampil. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan permintaan, baik absolut maupun relatif terhadap tenaga kerja tidak terampil. Mellor (1985, diacu dalam Bappenas, 2018) melihat bahwa strategi pembangunan atau industrialisasi yang digerakkan oleh pembangunan pertanian (*agricultural-development-led industrialization*) atau ADLI *strategy* merupakan pilihan yang tepat bagi negara berkembang. Ada beberapa alasan menyangkut strategi ini yaitu karena sektor pertanian lebih padat karya dari sektor lainnya, kenaikan pendapatan pertanian menghasilkan kebocoran dalam permintaan manufaktur padat karya pada sisi konsumsi dan permintaan input sektor manufaktur pada sisi produksi, ekspansi produksi pertanian bersifat *less import-intensive* daripada kenaikan produksi manufaktur, dan yang terakhir karena infrastruktur pertanian yang diperlukan untuk

meningkatkan produktivitas pertanian memiliki rasio keluaran tenaga kerja yang tinggi. Strategi ADLI menjadi penting bagi kebijakan harga karena memungkinkan petani mendapat manfaat dari peningkatan produktivitas pertanian.

3. Strategi atau kebijakan yang dapat mendorong peningkatan produktivitas, yaitu suatu kebijakan yang beroperasi melalui pasar komoditi atau pasar faktor produksi. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dari aset yang dimiliki oleh penduduk miskin.

Nafziger (2005, diacu dalam Bappenas, 2018) menambahkan beberapa poin dalam bukunya yang berjudul *Economic Development* diantaranya:

1. Reformasi Agraria dan Retribusi Lahan.

Saat ini ketersediaan lahan pertanian yang subur di negara berkembang sudah semakin berkurang. Dengan adanya reformasi agraria dan retribusi lahan upaya untuk mengurangi kemiskinan dapat teratasi.

2. Permodalan dan Perkreditan.

Permasalahan akses terhadap modal dan kredit seperti misalnya perbankan sebagai upaya lepas dari kemiskinan masih menjadi kesulitan bagi masyarakat miskin. Hal ini karena prosedur yang rumit dan tidak adanya jaminan seperti yang diharuskan dalam proses kredit bank. Skema permodalan dan perkreditan khusus yang lebih mudah dan terjangkau seperti “Grameen Bank” di Bangladesh perlu diterapkan agar masyarakat miskin memiliki kesempatan untuk memperbaiki ekonominya.

3. Peningkatan Sarana Pendidikan dan Pelatihan.

Pendidikan merupakan investasi yang sangat penting agar masyarakat dapat terus menghasilkan pendapatan melalui apa yang telah dipelajari. Program pendidikan dasar yang diberikan secara gratis bagi masyarakat menjadi hal yang wajib dilakukan khususnya di negara berkembang. Kualitas pendidikan, peningkatan kesehatan dan nutrisi penduduk perlu dilakukan secara bersamaan khususnya bagi anak-anak di keluarga miskin agar mereka tidak lagi terperangkap dalam rantai kemiskinan.

Todaro dan Smith (2015, diacu dalam Bappenas, 2018) menyampaikan bahwa program bantuan pemerintah dengan transfer langsung dan subsidi akan berhasil dan

menjadi efektif dengan beberapa prasyarat. Pertama, dikarenakan sumber daya terbatas maka harus dipastikan bahwa transfer dan subsidi benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan. Kedua, penerima tidak boleh bergantung pada bantuan, melainkan menjadi termotivasi untuk membangun usaha sendiri maupun aset seperti pendidikan anak yang nantinya dapat membantu keluarganya keluar dari jerat kemiskinan.

Indeks Keterbukaan Perdagangan

Di era globalisasi yang semakin berkembang, Indeks Keterbukaan Ekonomi menjadi sebuah ukuran untuk menilai hubungan suatu negara dengan negara lain. Keterbukaan ekonomi membuat terbukanya akses perdagangan (*trade openness*) dan akses permodalan luar negeri (*financial openness*). *Trade Openness Index* merupakan jumlah nilai ekspor dan impor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). *Trade Openness Index* berfungsi untuk menilai kinerja perdagangan suatu negara dan akan memberikan dampak positif terhadap GDP. *Trade Openness Index* yang semakin besar, akan mengindikasikan juga besarnya rasio keterbukaan ekonomi di suatu negara.

Keterbukaan ekonomi menggambarkan mobilitas modal secara global menjadi semakin lancar. Keterbukaan ekonomi merupakan ukuran kebijakan untuk mengatur arus barang dan jasa serta arus modal secara internasional baik dalam bentuk membatasi maupun memperlonggar hubungan internasional antarnegara (Nuraini dan Mudakir, 2019). Pertumbuhan ekonomi khususnya di negara berkembang tidak ditopang oleh keuntungan dari perdagangan saja, melainkan juga karena adanya investasi luar negeri. Investasi Luar Negeri (*Foreign Direct Investment*) menjadi salah satu ukuran keterbukaan ekonomi. Keterbukaan ekonomi saat ini lebih dari sekedar perdagangan dan regulasi, melainkan tentang kondisi yang lebih luas pada perekonomian suatu negara.

Legatum Institute (2019) mengungkapkan bahwa penggunaan indeks keterbukaan ekonomi telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Perbaikan dalam ketersediaan dan jangkauan data telah meningkatkan potensi untuk menangkap perbedaan antar negara di sejumlah tingkatan, tidak hanya pada hasil namun juga di berbagai dimensi kebijakan. Berdasarkan laporan *Global Index of Economic Openness* tahun 2019, Legatum Institute menyusun unsur-unsur keterbukaan ekonomi ke dalam empat tema besar:

- **Akses Pasar dan Infrastruktur** (*Market Access and Infrastructure*) mengukur kualitas infrastruktur yang memungkinkan terjadinya perdagangan seperti komunikasi, transportasi, dan energi. Perdagangan dapat berkembang apabila

pasar memiliki infrastruktur yang memadai. Perdagangan seperti ini mengarah ke pasar yang lebih kompetitif dan efisien karena memungkinkan produk dan ide baru untuk diuji, didanai, dan dikomersialkan. Pada akhirnya, ini dapat menguntungkan konsumen melalui variasi barang yang lebih banyak dengan harga yang lebih kompetitif.

- **Lingkungan Investasi** (*Investment Environment*) mengukur sejauh mana investasi dilindungi secara memadai melalui keberadaan hak milik, perlindungan investor, dan penegakan kontrak. Semakin sistem hukum melindungi investasi, misalnya melalui hak milik, maka semakin banyak investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
- **Kondisi Perusahaan** (*Enterprise Condition*) mengukur seberapa mudah bagi bisnis untuk mulai bersaing dan berkembang. Pasar yang dapat bersaing dengan hambatan masuk yang rendah menjadi hal penting bagi bisnis untuk dapat berinovasi dan mengembangkan ide-ide baru.
- **Tata Kelola** (*Governance*) mengukur sejauh mana pemerintah bekerja secara efektif dan tanpa korupsi. Sifat pemerintahan dalam suatu negara memiliki dampak yang besar pada kemakmuran negaranya. Aturan hukum, institusi yang kuat, dan kualitas regulasi berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti halnya pemerintah yang kompeten dengan memberlakukan kebijakan secara efisien dan merancang regulasi yang memberikan tujuan kebijakan tanpa terlalu membebani.

2.1.2 Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan sebuah ukuran untuk jumlah uang yang diperoleh setiap orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil penghitungan Pendapatan Nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu negara. Penghitungan pendapatan per kapita mencakup pria, wanita, dan anak, bahkan bayi baru lahir, sebagai anggota populasi. Pendapatan per kapita berbeda dengan pengukuran umum lainnya atas kemakmuran suatu daerah seperti pendapatan rumah tangga, yang menghitung semua orang yang tinggal di bawah satu atap sebagai rumah tangga, ataupun pendapatan keluarga, yang dianggap sebagai keluarga yang terkait dengan kelahiran, perkawinan, atau adopsi yang tinggal dibawah atap yang sama.

Untuk menghitung pendapatan per kapita, *World Bank* menggunakan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product (GNP)*. Alasan penggunaan PNB dalam penghitungan pendapatan per kapita karena PNB hanya menghitung pendapatan warga negara baik yang berada di dalam maupun luar negeri. Hal ini akan lebih merepresentasikan pendapatan warga negara yang sesungguhnya.

$$\text{Pendapatan Per Kapita} = \frac{\text{PNB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Semakin tinggi angka pendapatan per kapita, maka semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penghitungan PNB per kapita juga dapat menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam fungsi yang lebih kompleks, pendapatan per kapita juga dapat menilai keterjangkauan suatu daerah. Misalnya, dalam kasus pengukuran harga *real estate*, pendapatan per kapita dapat menjadi ukuran apakah harga rumah di perumahan tersebut cukup terjangkau bagi rata-rata keluarga di wilayah tersebut. Selain itu, bisnis juga dapat menggunakan pendapatan per kapita sebagai acuan untuk membuka usaha di suatu kota atau wilayah tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita dalam suatu wilayah, semakin tinggi juga peluang perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Menurut Rahardja dan Manurung (2008, diacu dalam Febtiyanto 2016), apabila pendapatan per kapita semakin tinggi, maka daya beli masyarakat, kesempatan memperoleh gizi, kesehatan, dan pendidikan juga semakin meningkat, namun hal tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila peningkatan pendapatan per kapita juga diiringi oleh pemerataan distribusi pendapatan.

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah data statistik yang dikembangkan dan disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengukur tingkat pembangunan sosial dan ekonomi di berbagai negara. Indeks ini adalah alat yang digunakan untuk mengikuti perubahan level pembangunan dari waktu ke waktu dan untuk membandingkan tingkat pembangunan di berbagai negara. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dilaporkan serta dipublikasikan secara berkala dalam Human Development Report (HDR).

IPM dibuat untuk menekankan bahwa manusia dan kemampuannya harus menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan suatu negara, bukan pertumbuhan ekonomi saja. Indeks ini juga dapat digunakan untuk mengkaji berbagai pilihan kebijakan suatu

negara. Misalnya, apabila dua negara memiliki pendapatan nasional bruto per kapita yang sama, maka IPM dapat menjadi ukuran lainnya untuk menilai kedua negara tersebut.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi kesehatan dinilai dengan angka harapan hidup saat lahir. Dimensi pendidikan diukur dengan rata-rata lama sekolah untuk orang dewasa berusia 25 tahun ke atas dan masa sekolah yang diharapkan untuk anak usia masuk sekolah. Dimensi standar hidup diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto per Kapita berdasarkan paritas daya beli, metrik yang umum digunakan untuk mencerminkan pendapatan rata-rata.

IPM menyederhanakan dan menangkap hanya sebagian dari apa yang dibutuhkan oleh pembangunan manusia. HDI tidak mencerminkan ketidaksetaraan, kemiskinan, keamanan manusia, pemberdayaan, dan lain lain. Manfaat IPM menurut BPS yaitu:

- Sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- Sebagai penentu atas peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Sejak tahun 2014, Indonesia mengimplementasikan metode penghitungan IPM terbaru untuk menghitung IPM yang disajikan secara periodik setiap tahun. Metodologi penghitungan IPM mengalami perubahan karena beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM.

Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena selain tidak menggambarkan kualitas pendidikan, angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Lalu PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam metodologi penghitungan sebelumnya, menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Indikator yang berubah dalam metodologi penghitungan IPM yaitu Angka Melek Huruf diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah, dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto per kapita. Metode agregasi juga diubah

dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi dapat diperoleh dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Pendapatan masyarakat pada suatu wilayah juga lebih tergambarkan dengan menggunakan PNB.

Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini, penulis ingin menyamapaikan kajian dan hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Manzoor, Wei, Nurannabi, dan Subhan (2019) melakukan penelitian mengenai peran UMKM dalam Pengentasan Kemiskinan di wilayah South Asian Association of Regional Cooperation (SAARC) dengan Analisis Data Panel.

Tujun utama dari penelitian tersebut adalah untuk mengevaluasi perkembangan agenda pengentasan kemiskinan di negara-negara SAARC melalui pengembangan usaha kecil dan menengah karena dianggap sebagai jalan pintas untuk mengurangi kemiskinan. Menurut pengetahuan penulis, penelitian yang dilakukan di negara berkembang seperti kawasan SAARC sangat terbatas. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dampak pertumbuhan UMKM terhadap pengentasan kemiskinan yang masih menjadi isu panas di wilayah SAARC.

Sebagai ukuran kemiskinan di wilayah SAARC, peneliti menggunakan indikator 20% pendapatan termiskin sebagai persentase dari PDB (*Income share held by lowest 20%*). Perkembangan UMKM diukur melalui pangsa UMKM dalam PDB di masing-masing negara. Data Panel telah dikembangkan untuk periode 1990-2015, dan penelitian ini menggunakan metode *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Multiple Regression Models* untuk menganalisis data yang diamati. Periode analisis yaitu mulai dari tahun 1990 sampai dengan 2015 atau selama 26 tahun.

Hasil utama pada penelitian ini adalah mendukung dampak positif yang signifikan dari pertumbuhan UMKM dalam pengentasan kemiskinan. Ada tiga faktor utama yang memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan di wilayah SAARC, yaitu: pertumbuhan UMKM, keterbukaan perdagangan, dan pengembangan sektor sosial. Ketiga faktor ini sangat penting dan harus menjadi prioritas pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. Studi ini berkontribusi pada literatur mengenai UMKM dan memperluas pengetahuan para peneliti dengan menggambarkan peran UMKM dalam pengurangan kemiskinan.

Nursini (2020) melakukan penelitian mengenai UMKM dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh UMKM terhadap pengentasan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui penyerapan tenaga kerja dari tahun 1997 hingga 2018.

Sebagai ukuran kemiskinan, penelitian ini menggunakan HeadCount Index (P0), Poverty Gap Index (P1), dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2). Untuk UMKM, penelitian ini mengklasifikasikan berdasarkan skalanya, yaitu Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil (UMK). Pertumbuhan Ekonomi, Keterbukaan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, dan Investasi menjadi variabel kontrolnya. Penelitian ini mengembangkan model analisis yang berbeda dari penelitian sebelumnya dengan membagi menjadi dua kategori yaitu pengaruh langsung UMKM terhadap pengentasan kemiskinan dan pengaruh tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja.

Hasilnya, penelitian itu menemukan bahwa berdasarkan skala UMKM yang telah ditentukan, ada implikasi yang berbeda bagi pengentasan kemiskinan. UKM memegang pengaruh yang lebih besar daripada UMK karena tidak sekedar mengurangi penduduk miskin, tapi juga Indeks Kearifan Kemiskinan dan Kesenjangan. Kemudian, dari keempat variabel kontrol, hanya pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh langsung UKM dan UMK, signifikan terhadap semua indikator pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM dapat menurunkan persentase penduduk miskin, jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan, dan disparitas rata-rata pengeluaran penduduk miskin.

Berdasarkan temuan ini, ada beberapa rekomendasi kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan yaitu: (i) perlu adanya dukungan berupa kepastian pasar bagi produk UMKM untuk menopang siklus produksi melalui digitalisasi; (ii) produk UMKM harus terus dipromosikan hingga ke mancanegara, sehingga keterbukaan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan; dan (iii) investasi juga harus tersedia di sektor UMKM, tidak hanya pada industri skala besar.

Berdasarkan literatur dan argumen di atas, maka hipotesis yang akan diuji adalah :

H1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara Pertumbuhan UMKM dengan angka Kemiskinan.

H2 : Terdapat hubungan yang signifikan antara Indeks Keterbukaan Perdagangan dengan angka Kemiskinan.

H3 : Terdapat hubungan yang signifikan antara Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita dengan angka Kemiskinan.

H4 : Terdapat hubungan yang signifikan antara Indeks Pembangunan Manusia dengan angka Kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Sampel Penelitian dan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber terpublikasi dan dikumpulkan untuk melakukan penelitian. Data yang telah terkumpul dan disusun menjadi panel dataset terdiri dari 5 negara ASEAN yaitu Indonesia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam mulai dari tahun 2014-2019. Seluruh data yang digunakan penulis berasal dari beberapa sumber situs web seperti *Asian Development Bank*, *Macrotrend Data*, *Asian Regional Integration Center*, dan *Human Development Report*.

Tabel Data dan Sumber Data

Negara	Variabel	Satuan	Sumber Data
Indonesia Myanmar Filipina Thailand Vietnam	Proporsi Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	Persentase	Asian Development Bank Basic Statistic
Indonesia Myanmar Filipina Thailand Vietnam	Pertumbuhan UMKM	Persentase	ADB Asia SME Monitor 2020 Database
Indonesia		Persentase	

Myanmar Filipina Thailand Vietnam	Indeks Keterbukaan Perdagangan		Asian Regional Integration Center
Indonesia Myanmar Filipina Thailand Vietnam	Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita	Persentase	Macrotrends Data
Indonesia Myanmar Filipina Thailand Vietnam	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	Human Development Report

Spesifikasi Model

Model yang digunakan dalam menguji Pengaruh Pertumbuhan UMKM terhadap Pengentasan Kemiskinan di wilayah ASEAN yaitu dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$YP_{it} = \alpha_{0it} + \alpha_1 GSME_{it} + \alpha_2 TOI_{it} + \alpha_3 GIPC_{it} + \alpha_4 HDI_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

dimana:

i = Jumlah Negara (1,2,3,4,5)

t = Periode Waktu

YP = Proporsi Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

GSME = Pertumbuhan UMKM

TOI = Indeks Keterbukaan Perdagangan

GIPC = Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita

HDI = Indeks Pembangunan Manusia

ε_{it} = Error Regresi

Definisi Operasional Variabel

Berikut ini merupakan pengertian variabel beserta definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

Proporsi Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional juga dikenal dengan tingkat kemiskinan nasional (*national poverty rate*). Proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan nasional didefinisikan sebagai proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Indikator ini dinyatakan dalam persentase. Indikator berkaitan erat dengan ukuran pembangunan manusia lainnya seperti pencapaian Pendidikan, melek huruf, status kesehatan, kematian, dan pembangunan ekonomi domestik. Proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dihitung menggunakan data konsumsi atau pendapatan. Data ini dikumpulkan dari survei rumah tangga yang representative secara nasional.

Data yang akan digunakan yaitu dari periode tahun 2014 hingga tahun 2019. Data diperoleh dari Laporan Tahunan berjudul “ADB Basic Statistic” yang dilaporkan oleh Asian Development Bank dari tahun 2013 sampai tahun 2021. Data Proporsi Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan didapatkan atas perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$P_0 = \frac{1}{N} + \sum_{i=1}^N I(y_i \leq z) = \frac{N_p}{N}$$

Pertumbuhan UMKM

Pertumbuhan UMKM (*Growth of SMEs*) merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan jumlah UMKM pada suatu negara. Pertumbuhan UMKM dinyatakan dalam persentase, yang menunjukkan kenaikan jumlah UMKM dari satu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan UMKM dihitung dengan menggunakan rumus sederhana yaitu Persentase Pertumbuhan. Rumus dari Persentase Pertumbuhan UMKM yaitu:

$$(nilai\ akhir - nilai\ awal) / nilai\ awal \times 100\%$$

Dimana nilai awal adalah jumlah UMKM pada tahun awal dan nilai akhir adalah jumlah UMKM pada tahun berikutnya setelah tahun awal. Misalnya, untuk mengetahui pertumbuhan UMKM di tahun 2015, maka penghitungannya adalah sebagai berikut: (jumlah UMKM tahun 2015-jumlah UMKM tahun 2014)/jumlah UMKM tahun 2014 x 100%.

Indeks Keterbukaan Perdagangan

Indeks Keterbukaan Perdagangan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keterbukaan ekonomi suatu negara dengan menghitung proporsi perdagangan terhadap PDB. Rasio perdagangan terhadap PDB sering digunakan untuk mengukur kepentingan transaksi internasional relatif terhadap transaksi domestik. Indikator ini dihitung di setiap negara sebagai rata-rata sederhana, yaitu rata-rata dari total perdagangan (jumlah ekspor dan impor barang dan jasa) relatif terhadap PDB. Badan Pusat Statistik menyebut ini sebagai Derajat Keterbukaan. Semakin besar derajat keterbukaan menunjukkan semakin terbukanya perekonomian suatu wilayah. Rumus untuk menghitung Derajat Keterbukaan, yaitu:

$$\text{Derajat Keterbukaan} = \frac{\text{Ekspor} + \text{Impor}}{\text{PDB}} \times 100$$

Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita

Untuk berkembang menjadi negara maju, pendapatan per kapita merupakan sebuah tolak ukur dan juga gambaran mengenai kondisi perekonomian suatu negara. Pendapatan per kapita merupakan sebuah ukuran untuk jumlah uang yang diperoleh setiap orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dihitung supaya pemerintah dapat memberikan solusi berbentuk kebijakan yang pas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ekonomi penduduknya. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil penghitungan Pendapatan Nasional dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara atau wilayah geografis tertentu. Pendapatan per kapita dihitung menggunakan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product (GNP)*. Berikut rumus dari penghitungan pendapatan per kapita:

$$\text{Pendapatan Per Kapita} = \frac{\text{PNB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan satu indikator untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. IPM terdiri atas 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan negara dalam membangun kualitas hidup manusia. Metode penghitungan IPM berubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata

geometrik. IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, Pendidikan, dan pengeluaran. Berikut rumus untuk menghitung IPM:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran} \times 100}$$

Metode Analisis Data

Regresi data panel merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series*, dimana unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Dengan kata lain, data panel adalah data dari beberapa individu yang sama dan diamati dalam kurun waktu tertentu. Regresi data panel digunakan untuk melihat hubungan, korelasi, atau pengaruh dari variabel yang berjumlah dua atau lebih dimana data yang digunakan adalah data panel.

Dalam meneliti pengaruh Pertumbuhan UMKM terhadap Pengentasan Kemiskinan di wilayah ASEAN, peneliti menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$YP_{it} = \alpha_{0it} + \alpha_1 GSME_{it} + \alpha_2 TOI_{it} + \alpha_3 GIPC_{it} + \alpha_4 HDI_{it} + \varepsilon_{it}$$

dimana:

i	= Jumlah Negara (1,2,3,4,5)
t	= Periode Waktu
YP	= Proporsi Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan
GSME	= Pertumbuhan UMKM
TOI	= Indeks Keterbukaan Perdagangan
GIPC	= Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita
HDI	= Indeks Pembangunan Manusia
ε_{it}	= Error Regresi

Metode regresi data panel dapat memberikan hasil dugaan yang bersifat *Best Linear Unbiased Estimation (BLUE)* apabila semua asumsi terpenuhi, salah satunya yaitu *non-autocorrelation*. Saat kita melakukan analisis data panel, *non-autocorrelation* inilah yang sulit terpenuhi, dan mengakibatkan pendugaan parameter tidak lagi bersifat BLUE. Jika data panel dianalisis menggunakan pendekatan model *time series*, maka akan ada informasi keragaman dari unit *cross section* yang terabaikan dalam pemodelan. Pertimbangan keragaman yang terjadi dalam unit *cross section* inilah yang menjadi salah satu keuntungan dari analisis regresi data panel.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Tabel Data Statistik Deskriptif Proporsi Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

	POV_IN	POV_MY	POV_PH	POV_TH	POV_VI
Mean	10.53	27.36	20.55	8.93	6.43
Median	10.75	25.2	21.6	9.25	5.8
Maximum	11.3	32.1	25.2	10.5	8.4
Minimum	9.4	24.8	16.6	6.2	5.8
Std. Dev.	0.77	3.67	3.32	1.70	1.07
Observations	6	6	6	6	6

Sumber: Output Eviews 10 (telah diolah kembali)

Variabel Proporsi Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan yang dimiliki oleh 5 negara ASEAN memiliki nilai terendah sebesar 5.8 yang dihasilkan Vietnam dan nilai tertinggi sebesar 32.1 yang dihasilkan Myanmar. Proporsi Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan pada negara Myanmar memiliki rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 27.36. Sementara itu, Vietnam memiliki rata-rata terendah sebesar 6.43. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan yang diukur melalui proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan sangat tinggi terjadi pada Myanmar, sementara di Vietnam sangat rendah.

Tabel Statistik Pertumbuhan UMKM

	GSME_I	GSME_M	GSME_P	GSME_T	GSME_V
	N	Y	H	H	I
Mean	2.48	13.01	1.18	2.3	10.03
Median	2.25	4.6	0.8	1.05	9.5
Maximum	4	52.4	8.4	8.6	14.2
Minimum	2	0.3	-4.9	0.8	7.9
Std. Dev.	0.76	20.01	4.25	3.09	2.17
Observations	6	6	6	6	6

Sumber: Output Eviews 10 (telah diolah kembali)

Variabel Pertumbuhan UMKM yang dimiliki oleh 5 negara ASEAN memiliki nilai terendah sebesar -4.9 yang dihasilkan Filipina dan nilai tertinggi sebesar 52.4 berasal dari Myanmar. Pertumbuhan UMKM pada negara Myanmar memiliki rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 13.01. Sementara itu, Filipina memiliki rata-rata terendah sebesar 1.18. Myanmar mengalami pertumbuhan UMKM yang sangat besar dengan tingkat pertumbuhan 52.4%. Sedangkan Filipina bukan mengalami pertumbuhan, melainkan penurunan hingga -4.9%.

Tabel Statistik Keterbukaan Perdagangan

	TOI_IN	TOI_MY	TOI_PH	TOI_TH	TOI_VI
Mean	33.46417	49.47571	47.20639	100.2028	147.0818
Median	33.04202	49.60809	46.89993	99.78042	149.6638
Maximum	39.78627	54.09692	50.86965	111.0997	158.6347
Minimum	29.22795	44.03122	43.07548	88.99961	125.8552
Std. Dev.	3.782705	4.835387	3.204379	7.145257	12.61859
Observations	6	6	6	6	6

Sumber: *Output Eviews 10 (telah diolah kembali)*

Variabel Keterbukaan Perdagangan yang dimiliki oleh 5 negara ASEAN memiliki nilai terendah sebesar 29.22 yang dihasilkan Indonesia dan nilai tertinggi sebesar 158.63 berasal dari Vietnam. Keterbukaan Perdagangan pada negara Vietnam memiliki rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 147.08. Sementara itu, Indonesia memiliki rata-rata terendah sebesar 33.46. Vietnam di periode ini sedang mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan perdagangan, sementara Indonesia memiliki rata-rata terendah dalam keterbukaan perdagangan.

Tabel Statistik Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita

	GIPC_IN	GIPC_MY	GIPC_PH	GIPC_TH	GIPC_VI
Mean	2.348333	4.833333	3.3	4.173333	6.275
Median	3.835	1.685	2.745	4.875	6.705
Maximum	7.71	15.5	7.17	10.66	8.49
Minimum	-4.58	0.33	1.4	-3.51	2.7
Std. Dev.	5.466617	6.016237	2.142858	6.051306	2.175139

Observations	6	6	6	6	6
---------------------	---	---	---	---	---

Sumber: *Output Eviews 10 (telah diolah kembali)*

Variabel Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita yang dimiliki oleh 5 negara ASEAN memiliki nilai terendah sebesar -4.58 yang dihasilkan Indonesia dan nilai tertinggi sebesar 15.5 berasal dari Myanmar. Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita pada negara Vietnam memiliki rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 6.25. Sementara itu, Indonesia memiliki rata-rata terendah sebesar 2.34. Hasil diatas menunjukkan bahwa pendapatan per kapita Vietnam mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya juga angka keterbukaan perdagangan di negara tersebut. Sementara hasil sebaliknya dialami oleh Indonesia dimana pendapatan per kapita mengalami penurunan seiring dengan rendahnya tingkat keterbukaan perdagangan-nya.

Tabel Statistik Indeks Pembangunan Manusia

	HDI_IN	HDI_MY	HDI_PH	HDI_TH	HDI_VI
Mean	0.704167	0.567333	0.706333	0.760167	0.694
Median	0.705	0.5675	0.706	0.7605	0.6945
Maximum	0.718	0.583	0.718	0.777	0.704
Minimum	0.69	0.55	0.696	0.742	0.683
Std. Dev.	0.010458	0.012879	0.007763	0.013556	0.00772
Observations	6	6	6	6	6

Sumber: *Output Eviews 10 (telah diolah kembali)*

Variabel Indeks Pembangunan Manusia yang dimiliki oleh 5 negara ASEAN memiliki nilai terendah sebesar 0.55 yang dihasilkan Myanmar dan nilai tertinggi sebesar 0.77 berasal dari Thailand. Indeks Pembangunan Manusia pada negara Thailand memiliki rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 0.76. Sementara itu, Myanmar memiliki rata-rata terendah sebesar 0.56. Hasil diatas mengindikasikan bahwa Thailand telah berhasil meningkatkan kualitas penduduknya dan Myanmar masih berupaya dalam meningkatkan kualitas penduduknya.

Tabel Pengujian Hipotesisi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	71.52036	7.641959	9.358905	0.0000
GIPC?	-0.031817	0.042303	-0.752128	0.4590
GSME?	-0.024239	0.084793	-0.285858	0.7773
HDI?	-81.02048	10.69446	-7.575927	0.0000
TOI?	-0.028828	0.006039	-4.773448	0.0001
Weighted Statistics				
R-squared	0.587024	Mean dependent var	26.10952	
Adjusted R-squared	0.520948	S.D. dependent var	24.27135	
S.E. of regression	3.750930	Sum squared resid	351.7369	
F-statistic	8.884048	Durbin-Watson stat	0.256801	
Prob(F-statistic)	0.000132			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.642951	Mean dependent var	14.76333	
Sum squared resid	724.0701	Durbin-Watson stat	0.257515	

Sumber: Output Eviews 10

Berdasarkan hasil Chow Test diatas, telah diperlihatkan bahwa nilai probabilitas Cross-Section F sebesar $0.0000 < 0.05$. Artinya, *Fixed Effect Model* terpilih sebagai model terbaik yang akan digunakan untuk analisa regresi dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan UMKM terhadap Kemiskinan

Meskipun secara simultan seluruh variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, hasil analisis menunjukkan sesuatu yang berbeda, dimana Pertumbuhan UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Manzoor et al. (2019) dimana mereka menemukan pengaruh yang signifikan antara Pertumbuhan UMKM terhadap Pengentasan Kemiskinan di wilayah SAARC atau Asia Selatan. Ada beberapa kemungkinan yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan wilayah dan periode penelitian menjadi salah satu pembeda yang tentunya sangat mempengaruhi hasil regresi. Kondisi perekonomian dan sosial masyarakat pada setiap negara di masing-masing wilayah juga turut mempengaruhi hasil akhir penelitian.

Secara rata-rata, kondisi Kemiskinan di 5 negara ASEAN ini memang mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini secara tidak langsung, semakin menyeleksi

masyarakat yang benar-benar sulit keluar dari bawah garis kemiskinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa, masyarakat yang saat ini berada jauh di bawah garis kemiskinan adalah mereka yang sangat membutuhkan bantuan mendasar, seperti akses kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu, bukan pertumbuhan UMKM lagi yang saat ini memberikan pengaruh signifikan terhadap masyarakat, melainkan bantuan tunai, akses pendidikan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur.

Pengaruh Indeks Keterbukaan Perdagangan terhadap Kemiskinan

Indeks Keterbukaan Perdagangan memiliki hasil signifikan terhadap Pengentasan Kemiskinan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Manzoor et al. (2019) dimana terdapat pengaruh yang signifikan antara keterbukaan perdagangan terhadap 20% masyarakat pemegang pendapatan terkecil/termiskin. Menurut penelitian tersebut, apabila keterbukaan perdagangan meningkat, hal tersebut juga mengarah pada penguatan kegiatan ekonomi. Untuk memenuhi peningkatan permintaan barang, baik ekspor maupun impor, diperlukan tenaga kerja yang lebih banyak dan secara langsung mempengaruhi peningkatan lapangan kerja. Apabila lapangan kerja meningkat, maka hal tersebut tentu mempengaruhi angka kemiskinan.

Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita terhadap Kemiskinan

Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita memiliki hasil signifikan terhadap Pengentasan Kemiskinan, dimana hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Manzoor et al. (2019). Penelitian tersebut menemukan pengaruh positif dan sangat signifikan antara pertumbuhan pendapatan per kapita terhadap penduduk miskin. Ada 2 cara yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita, yaitu dengan meningkatkan pendapatan nasional dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Dengan kata lain, jika laju pertumbuhan penduduk lebih kecil dari pertumbuhan pendapatan nasional, maka pendapatan per kapita akan meningkat. Jika pendapatan per kapita meningkat, maka tingkat kemiskinan akan berkurang secara signifikan.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Indeks Pembangunan Manusia menjadi variabel yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Hal ini mengacu kembali kepada analisis sebelumnya antara Pertumbuhan UMKM terhadap Kemiskinan. Analisis diatas menyatakan bahwa masyarakat yang saat ini berada di bawah garis kemiskinan adalah mereka yang benar-benar sulit keluar dari garis kemiskinan karena tidak terpenuhinya

kebutuhan mendasar, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hal ini tergambarkan dalam Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri atas 3 dimensi dasar yaitu Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Manzoor et al. (2019) menunjukkan hasil yang sama seperti penelitian ini. Mereka menunjukkan bahwa perbaikan indikator sosial dan ekonomi, seperti angka melek huruf, harapan hidup, dan PDB per kapita memiliki peran positif signifikan dalam mengurangi kemiskinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian yang meneliti Pengaruh Pertumbuhan UMKM, Indeks Keterbukaan Perdagangan, Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pengentasan Kemiskinan dengan menggunakan analisis data panel di 5 Negara ASEAN pada periode 2014-2019 menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Pertumbuhan UMKM dengan Pengentasan Kemiskinan. Sementara itu, terdapat hubungan yang signifikan antara Indeks Keterbukaan Perdagangan, Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pengentasan kemiskinan di 5 negara ASEAN yang meliputi Indonesia, Filipina, Myanmar, Thailand, dan Vietnam.

Dapat disimpulkan bahwa hasil yang tidak signifikan pada Pertumbuhan UMKM terjadi karena masyarakat sangat sulit keluar dari garis kemiskinan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan secara mendasar yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hal ini juga menjelaskan mengapa Indeks Pembangunan Manusia menjadi variabel yang paling berpengaruh terhadap proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan. Tiga dimensi yang terdapat dalam Indeks Pembangunan Manusia menjadi gambaran bahwa pengentasan kemiskinan harus diawali dengan pemenuhan kebutuhan mendasar manusia. Dua variabel lainnya yaitu Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita dan Indeks Keterbukaan perdagangan menunjukkan hasil yang signifikan mempengaruhi pengentasan kemiskinan di 5 negara ASEAN. Keterbukaan Perdagangan akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan secara tidak langsung turut menambah pendapatan per kapita masyarakat sehingga angka kemiskinan pun dapat ditekan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan kebutuhan mendasar yang tergambarkan dalam Indeks Pembangunan Manusia yaitu akses kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, harus dipenuhi terlebih dahulu agar pengentasan kemiskinan dapat berjalan optimal. Pemerintah pada masing-masing negara yang masuk dalam penelitian ini perlu membuat program dan kebijakan pengentasan kemiskinan secara adil, merata, dan terstruktur. Pemerintah pusat harus melakukan kerja sama secara kompak, jujur, serta jelas dengan pemerintah daerah dalam program pengentasan kemiskinan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat memperluas jangkauan penelitian dengan menambah jumlah negara, menggunakan periode terbaru, ataupun memakai variabel lain yang juga mempengaruhi kemiskinan. Dengan hal tersebut, penelitian dapat menghasilkan temuan yang lebih variatif dan komprehensif.

Daftar Pustaka

- Aba, F. X. L. (2021). Institutional Change and Macroeconomic Variables in the ASEAN—Indonesia, Vietnam, and Cambodia: The Effects of a Trade War between China and USA. *Economies*, 9(4), 195.
- Adji, A., Hidayat, T., Tuhiman, H., Kurniawati, S., & Maulana, A. (2020, Januari). Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Usulan Perbaikan. Jakarta Pusat: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Ariwibowo, P. (2013). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian di Indonesia. *Journal of Applied Business and Economics*, 173-183.
- Bank, A. D. (n.d.). *Basic Statistics*. Retrieved from <https://www.adb.org/publications/series/basic-statistics>
- Bank, W. (n.d.). *The World Bank*. Retrieved from <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2016/10/02/tackling-inequality-vital-to-end-extreme-poverty-by-2030>
- CENTER, A. R. (n.d.). *ASIA REGIONAL INTEGRATION CENTER*. Retrieved from <https://aric.adb.org/database/integration>

- Dharmastuti, C. F. (2013). Analisis Pengaruh Mekanisme Internal Dan External Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Dan Kebijakan Dividen Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Go Publik Di Pasar Modal Indonesia). *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 9(1), 21-30.
- Febtiyanto, Y. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penentu Pendapatan Per Kapita Sebagai Upaya Menghindari Middle Income Trap (Studi Kasus Indonesia). 26-28.
- Gousario, F., & Dharmastuti, C. F. (2015). Regional financial performance and human development index based on study in 20 counties/cities of level I region. *The Winners*, 16(2), 152-165.
- Institute, L. (2019). *Global Index of Economic Openness*. Legatum Institute.
- Knoema. (n.d.). *Knoema*. Retrieved from Knoema:
<https://knoema.com/atlas/Indonesia/Poverty-rate-at-national-poverty-line>
- Macrotrends. (n.d.). Retrieved from <https://www.macrotrends.net/>
- Manzoor, F., Wei, L., Nurunnabi, M., & Subhan, Q. A. (2019). Role of SME in Poverty Alleviation in SAARC Region via Panel Data Analysis. *MDPI*, 1-14.
- Nations, U. (n.d.). *Indicators for Monitoring The Millenium Development Goals*. Retrieved from <http://mdgs.un.org/unsd/mi/wiki/1-1a-Proportion-of-population-below-national-poverty-line.ashx?From=Indicator%201-1a>
- Nursini. (2020). Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence fro Indonesia. *Routledge Taylor & Francis Group*, 153-166.
- P.P., R. N., & Mudakir, D. Y. (2019). Analisis Pengaruh Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: ASEAN Tahun 2007-2017). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 20-35.
- Programme, U. N. (n.d.). *Human Development Reports*. Retrieved from <http://hdr.undp.org/en/indicators/137506#>
- Rosengard, J. K., & Prasetyantoko, A. (2011). If the banks are doing so well, why can't I get a loan? Regulatory constraints to financial inclusion in Indonesia. *Asian Economic Policy Review*, 6(2), 273-296.
- Saadah, S., & Prijadi, R. (2012). Capital structure's dynamic response to exogenous variables: A case of listed manufacturing firms in Indonesia. *International Journal of Financial Research*, 3(2), 86.

- Saadah, S. (2016). Nilai tukar Rupiah dan kinerja pasar saham: Studi empirik pada Bursa Saham Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 20(2), 204-213.
- Secretariat, T. A. (2019). *ASEAN Key Figures 2019*. ASEAN Secretariat.
- Statistik, B. P. (n.d.). *Indeks Pembangunan Manusia*. Retrieved from <https://ipm.bps.go.id/page/ipm>
- Trihadmini, N., & BS W, P. (2011). *Dampak Multivariat Volatility, Contagion dan Spillover Efiect Pasar Keuangan Global terhadap Indeks Saham dan Nilai Tukar Rupiah di Indonesia*. University of Indonesia.
- UU No 20 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Republik Indonesia.
- Utomo, F. G. R., & Saadah, S. (2022). Exchange Rate Volatility and Economic Growth: Managed Floating and Free-Floating Regime. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(1), 173-183
- Uyanto, Stanislaus. (2021). An Extensive Comparisons of 50 Univariate Goodness-of-fit Tests for Normality”, *Austrian Journal of Statistics*, 51(3), 45–97.
- Wiranto, T. (2005). *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.